



THE HABIBIE CENTER BOOKLET B

Kebijakan Realokasi Anggaran



Zamroni Salim
Bawono Kumoro
Komaidi Notonegoro

Kebijakan Realokasi Anggaran

The Habibie Center Booklet B

The Habibie Center

Kebijakan Subsidi BBM dan Pembangunan Energi Berkelanjutan

Project Supervisor:

Rahimah Abdulrahim
(Direktur Eksekutif, The Habibie Center)

Hadi Kuntjara
(Deputi Direktur Operasional, The Habibie Center)

Peneliti:

Zamroni Salim
Bawono Kumoro
Komaidi Notonegoro

Desain dan Publikasi:

M. I. Qeis dan Rahma

Foto :

Zamroni Salim

The Habibie Center mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan, Energi, dan Perubahan Iklim Kerajaan Denmark dan Global Subsidies Initiative untuk dukungan tulus mereka terhadap proyek ini. Seluruh pandangan di dalam publikasi ini merupakan pandangan The Habibie Center dan tidak mencerminkan pandangan Kementerian Pembangunan, Energi, dan Perubahan Iklim Kerajaan Denmark dan Global Subsidies Initiative.

The Habibie Center Building
Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia
Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212
e-mail: thc@habibiecenter.or.id
www.habibiecenter.or.id

KEBIJAKAN REALOKASI ANGGARAN

Sudah menjadi rahasia umum bila subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah permasalahan pelik dan dilematis bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Alokasi subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, subsidi BBM mencapai Rp 164 triliun. Kemudian tahun 2012 membengkak menjadi Rp 211 triliun. Satu tahun berselang subsidi BBM mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 199 triliun. Subsidi BBM kembali naik di tahun 2014 menjadi Rp 249 triliun. Bahkan, di RUU APBN tahun 2015 besar subsidi BBM diperkirakan akan melonjak tajam menjadi Rp 291 triliun.

Selaras dengan itu realisasi konsumsi BBM bersubsidi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sebesar 41,79 juta kiloliter. Kemudian tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 45,07 juta kiloliter. Realisasi konsumsi BBM bersubsidi kembali melonjak tahun 2013 menjadi sebesar 46,25 juta kiloliter. Sedangkan

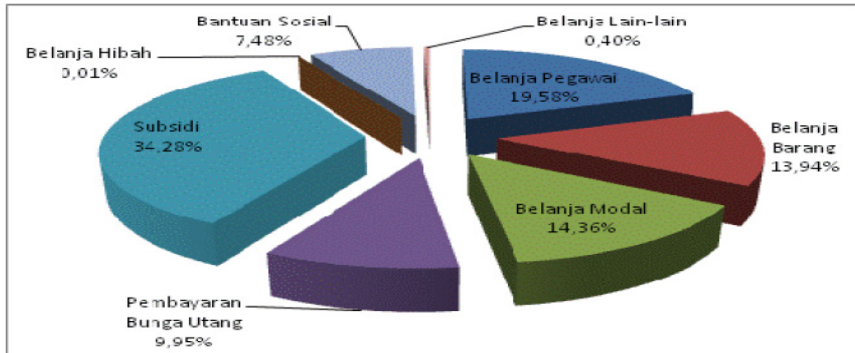
di tahun ini realisasi konsumsi BBM bersubsidi per tanggal 30 Juni 2014 telah mencapai 22,91 juta kiloliter dan diperkirakan akan melampaui kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 46 juta kiloliter.

Profil Alokasi Anggaran

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang gerak APBN relatif sempit. Belanja negara tercatat hampir selalu lebih besar dari total penerimaan negara dan hibah. Untuk menutup kekurangan anggaran belanja tersebut pemerintah melakukan pembiayaan (utang). Selain sering berada pada kondisi defisit, alokasi distribusi anggaran yang ditetapkan menggambarkan kualitas APBN dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup baik. Pada era Presiden Soeharto porsi belanja pembangunan yang dianggarkan di APBN relatif besar. Sedangkan pada era reformasi porsi belanja pembangunan- menjadi pos belanja modal relatif kecil. Sebagian besar belanja pemerintah pusat banyak di dominasi oleh belanja rutin seperti belanja pegawai, subsidi, pembayaran bunga utang, bantuan sosial, dan belanja hibah.

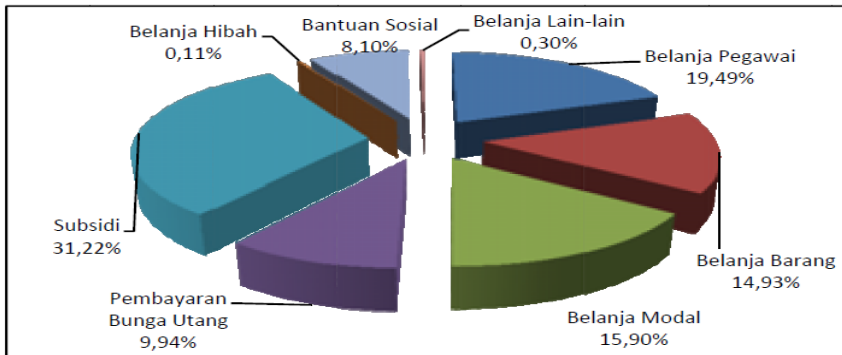
Berdasarkan data realisasi APBN, porsi belanja modal tahun 2012 dan 2013 masing-masing hanya 14,36% dan 15,90% terhadap total belanja pemerintah pusat. Alokasi anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran subsidi yang pada periode yang sama masing-masing mencapai 34,28% dan 31,22% terhadap total belanja pemerintah pusat. Komposisi dan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun anggaran tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:

**Grafik 1: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2012**



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012

**Grafik 2: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2013**



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013

Subsidi dan Sensitivitas Anggaran

Dari sisi anggaran kebijakan defisit anggaran pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan stimulus fiskal. Bila dilihat dari besarnya nilai defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah, angka defisit tahun 2014 sebesar 1,49% atau lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 2,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam angka nominal target defisit tahun 2014 tersebut adalah Rp 154,2 triliun.

Namun, bila dilihat dari angka nominal tampak besaran subsidi yang diberikan untuk BBM jauh lebih besar dari target defisit. Dengan kata lain beban anggaran lebih banyak disebabkan atau terkait dengan besaran subsidi. Lebih lanjut, sumber anggaran untuk pembiayaan defisit sebagian besar berasal dari hutang (Rp 164,7 triliun).

Di samping itu beban utang yang dianggarkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran juga mempunyai risiko fiskal akibat selalu meningkatnya utang pemerintah. Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan adanya tekanan fiskal terhadap APBN dimana meliputi: (1) Risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) Risiko utang pemerintah pusat; (3) Kewajiban kontinjensi pemerintah pusat, dan (4) Risiko pengeluaran negara yang dimandatkan atau diwajibkan. (Kementerian Keuangan, 2014)

Penjelasan dan edukasi ke publik terkait resiko fiskal ini sangat penting, mengingat tujuan yang ingin dicapai dari pengungkapan risiko fiskal seperti upaya untuk meningkatkan beberapa hal: (1) Kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) Meningkatkan keterbukaan fiskal (*fiscal transparency*); (3) Meningkatkan tanggung jawab fiskal (*fiscal accountability*), dan (4) Menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Resiko APBN bila asumsi dasar ekonomi makro tidak terpenuhi adalah jebolnya APBN atau semakin besarnya defisit anggaran. Atau dengan kata lain semakin besar hutang pemerintah yang sebenarnya merupakan hutang rakyat. Untuk mengukur tingkat keparahan bila asumsi dasar ekonomi makro terkait dengan minyak, pemerintah mengeluarkan indikator sensitivitas defisit (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Sensitivitas Defisit RAPBN 2014 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

No.	Uraian	Satuan Perubahan Asumsi	2014	
			Asumsi	Potensi Tambahan Defisit (triliun Rp)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-1	6,4	2,95 s. d. 4,79
2	Tingkat inflasi (%)	0,1	4,5	Tidak langsung
3	Nilai tukar rupiah (Rp/USD)	100	9.750	0,95 s.d. 1,23
4	Suku bunga SPN 3 bulan (%)	0,25	5,5	0,29 s.d. 0,52
5	Harga minyak (US\$/barel)	1	106	0,23 s.d. 0,53
6	<i>Lifting</i> minyak (ribu barel/hari)	-10	870	1,68 s.d. 1,94
7	<i>Lifting</i> gas (MBOEPD)	-10	1.240	0,99 s.d. 1,34

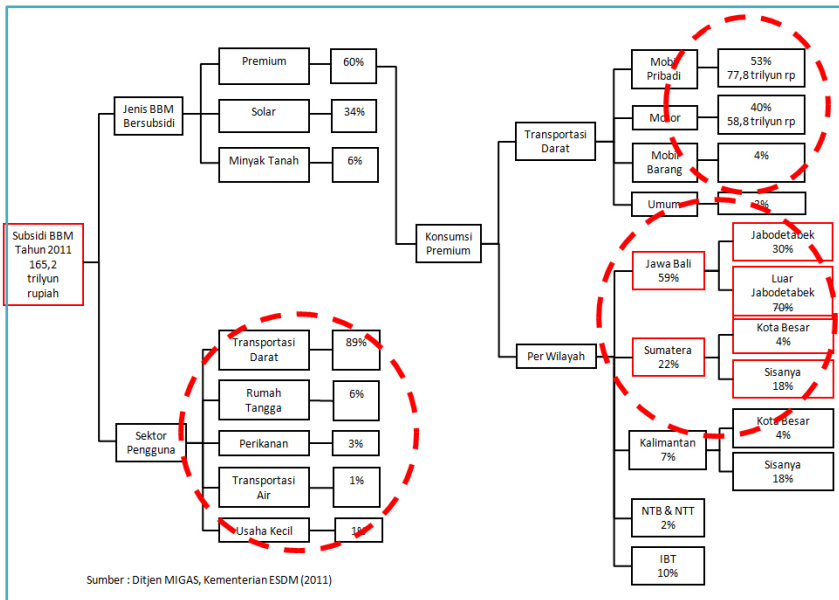
Sumber: Kementerian Keuangan.

Dari tabel 1 terlihat bahwa sensitivitas defisit yang terkait dengan minyak, harga minyak serta lifting minyak dan gas adalah tinggi. Secara kumulatif komponen terkait minyak tersebut menyumbang potensi tambahan defisit sebesar antara 2.90 sampai dengan 3.81 triliun rupiah bila asumsi dasarnya berubah untuk masing-masing satuan perubahan. Angka ini memberikan pesan bahwa ketergantungan kita terhadap minyak sangat tinggi sementara kita sudah tidak memiliki jumlah produksi yang memadai.

Urgensi Pengurangan Subsidi BBM dan Dampak Sosial Ekonomi

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2011 menunjukkan proporsi BBM bersubsidi lebih dinikmati oleh pemilik kendaraan roda empat (53%) ketimbang pemilik motor (40%) dan kendaraan umum (3%). Kemudian tercatat 59% konsumsi BBM bersubsidi dinikmati penduduk di pulau Jawa dan Bali. Sedangkan penduduk di daerah-daerah lain di luar Jawa dan Bali tidak banyak menikmati BBM bersubsidi, seperti konsumsi BBM bersubsidi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cuma 2% saja. Gambar berikut menunjukkan konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011 berdasarkan data Kementerian ESDM tersebut:

Gambar 1 : Pemanfaatan Subsidi BBM Tahun 2011



Apabila memang sebagian besar alokasi subsidi BBM selama ini cuma dinikmati oleh golongan menengah ke atas, seperti pemilik kendaraan bermotor, maka realokasi subsidi dengan proporsi lebih besar bagi golongan menengah ke bawah menjadi penting untuk dilakukan. Realokasi subsidi itu mendesak untuk diraelisasikan apabila membandingkan antara pengeluaran negara untuk subsidi BBM dengan penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas dimana terdapat defisit cukup besar. Karena itu, muncul pemikiran agar harga BBM bersubsidi dinaikkan demi mengurangi alokasi subsidi BBM di APBN untuk kemudian dialihkan kepada sektor-sektor penting lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur demi menunjang konektivitas antar daerah.

Dalam RAPBN tahun 2015 alokasi subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun dengan penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas dianggarkan sebesar Rp 206,8 triliun sehingga terdapat defisit sebesar Rp 84,3 triliun. Defisit itu menunjukkan seluruh penerimaan negara dari sektor minyak dan gas tidak lagi mencukupi lagi untuk membiayai alokasi subsidi BBM, untuk tidak mengatakan tekor. Karena itu, tidak ada jalan lain dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut selain menaikkan harga BBM bersubsidi dan melakukan relokasi subsidi BBM. Menaikkan harga BBM bersubsidi memang akan turut berpengaruh terhadap kenaikan inflasi.

Setiap kenaikan inflasi juga berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan, terutama golongan menengah ke bawah, dan mengakibatkan penurunan daya beli sehingga secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selain itu, menaikkan harga BBM bersubsidi juga akan mengundang resistensi politik dari kekuatan-keuatana politik di parlemen.

Untuk itu, guna meminimalisasi dampak inflasi kenaikan harga BBM bersubsidi dan resistensi politik tersebut, ada dua langkah dapat dilakukan pemerintahan mendatang. *Pertama*, menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap, misalkan Rp 500 per liter setiap tiga bulan sekali sehingga total kenaikan Rp 2.000 per tahun anggaran. Penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi juga harus diputuskan pada bulan dengan tingkat inflasi rendah. Hal ini selain dapat meminimalisasi efek inflasi dan memberikan kepastian juga dapat mencegah resistensi politik.

Kedua, realokasi dana subsidi BBM harus dilakukan secara transparan untuk melakukan pembiayaan terhadap program-program populis dan berpihak kepada golongan menengah ke bawah, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pedesaan melalui pembangunan jalan dan irigasi serta mencetak lahan pertanian juga harus dilakukan.

Kemudian bantuan dana tunai (*cash transfer*) untuk meringankan beban akibat kenaikan harga BBM bersubsidi masih perlu diberikan kepada golongan menengah ke bawah. Pada tahun 2005, 2008, dan 2013 pemerintah memberlakukan kebijakan *cash transfer* dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meredam penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dan membantu golongan menengah ke bawah. Program ini berbentuk pembayaran uang tunai sebesar Rp 300.000 diberikan secara langsung kepada keluarga miskin (Widjaja, 2009).

Kebijakan BLT cukup berhasil dalam membantu golongan menengah ke bawah dan meredam penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian sejumlah masalah mengiringi BLT, seperti ditemukan pihak berhak mendapatkan BLT tetapi tidak mendapatkan dana tersebut (Cameron dan Shah, 2011). Program BLT ke depan harus belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, termasuk kebutuhan untuk memilih sasaran bantuan dengan lebih baik dan pengawasan lebih kuat.

Perbaikan mekanisme pemberian BLT dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan transfer dana ke rekening mereka yang berhak menerima dimana sebelumnya sudah dibukakan rekening

bank terlebih dahulu sehingga tidak perlu lagi berdesak-desakan mengambil dana tunai. Bantuan tunai semacam BLT mengharuskan pihak penerima bantuan tersebut harus teridentifikasi jelas. Selain itu, kebijakan BLT juga membutuhkan mekanisme pemberian dana tunai.

Skenario Pengalihan Subsidi BBM

Mengurangi subsidi energi akan membebaskan anggaran negara dapat digunakan untuk tujuan lain. Dengan mengalokasikan dana-dana ini secara lebih tepat pada sektor kesejahteraan sosial dan kegiatan usaha, pemerintah dapat mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk secara efektif membantu mereka lebih membutuhkan. Di belahan dunia lain banyak upaya reformasi berfokus pada bagaimana mengkompensasi kelompok sosial dan usaha serta juga untuk meredam dampak kemungkinan inflasi dari pelaksanaan reformasi subsidi.

Skenario pengalihan (relokasi) subsidi BBM bisa dialokasikan untuk subsidi lain lebih produktif yang sudah dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN (APBNP 2014 dan APBN 2015). Perlu ada kebijakan untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM ke belanja yang sifatnya lebih produktif, seperti untuk pembangunan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dalam melakukan skenario relokasi anggaran ini sumber dana yang direalokasi berasal dari uang yang sebelumnya dianggarkan untuk subsidi BBM.

**Tabel 2: Skenario Pengalihan Subsidi BBM (miliar rupiah)
dengan Kenaikan Harga BBM Rp. 3000,-**

	APBNP 2014	APBN 2015	
		Awal	Realokasi
Total Subsidi	403035.6	433512.2	433512.2
Subsidi Energi	350300	363534.5	72422.7
Subsidi BBM	246500	291111.8	0
Subsidi Listrik	103800	72422.7	72422.7
Subsidi Non-Energi	52725.1	69977.7	73336.6296*
Subsidi Pangan	18164.7	18939.9	19849.0152*
Subsidi Pupuk	21048.9	35703.1	37416.8488*
Subsidi Benih	1564.8	939.4	984.4912*
Subsidi PSO	2197.1	3261.3	3417.8424*
Subsidi Bunga Kredit	3235.8	2484	2603.232*
Subsidi Pajak	6513.8	8650	9065.2*
Subsidi - Realokasi			217775
Pendidikan			72592
Kesehatan			72592
Infrastruktur (pertanian dan kelautan)			72592

Keterangan: (1) Pertumbuhan nilai subsidi untuk masing-masing komponen diasumsikan meningkat dari tahun ke tahun sebesar rata-rata 4,8 persen atau sekitar Rp72,8 triliun untuk kurun waktu 2008-2013 (Kementerian Keuangan, 2014). (2) Untuk data relokasi subsidi tahun 2014 didasarkan pada jumlah sisa konsumsi BBM sebesar 15 Juta KL (32.6%) dari total kuota 2014 sebesar 46 juta KL.

Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 3.000,- anggaran dapat dihemat adalah Rp. 217.775 miliar. Dengan skenario ini masing-masing mendapatkan realokasi ekstra Rp. 72.592 miliar. Realokasi subsidi adalah tambahan anggaran

subsidi untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (pertanian dan kelautan). Subsidi ini bisa digunakan untuk melengkapi program yang sudah di masing-masing kementerian, termasuk program Indonesia sehat dan Indonesia pintar.

Ilustrasi pengalokasian anggaran setelah adanya penurunan subsidi BBM sebesar Rp 3000 diuraikan sebagai berikut: realokasi anggaran bisa dipakai untuk membangun sarana dan prasarana terkait infrastruktur (secara umum), pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam beberapa gambar berikut (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2014).

**Gambar 2 : Infrastruktur Kesehatan
(Rumah sakit dan Puskesmas)**



Gambar 3 : Infrastruktur Pendidikan (Gedung Sekolah)



Gambar 4 : Infrastruktur Jalan Raya dan Rel Kereta Api



Gambar 5 : Pelabuhan Udara dan Laut



Di samping itu, realokasi subsidi BBM juga harus diarahkan kepada pembangunan infrastruktur demi menunjang konektivitas antardaerah. Kendala infrastruktur telah mengakibatkan pusat-pusat produksi tidak terkoneksi sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan ongkos logistik termahal. Kendala infrastruktur ini pula biang keladi dari rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.

Kendala infrastruktur dialami Indonesia saat ini tidak lain dikarenakan alokasi anggaran belanja infrastruktur dalam APBN selama ini masih terbilang kecil. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas antardaerah jelas memerlukan dana tidak sedikit. Apabila melihat tingkat ketertinggalan pembangunan infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitas, maka diperlukan dana sangat besar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan angka Rp 978 triliun bagi pembenahan infrastruktur secara keseluruhan dalam rentang waktu tahun 2010-2014, dengan kata lain sekitar Rp 200 triliun setiap tahun.

Alokasi belanja infrastruktur dalam APBN setiap tahun masih relatif kecil di bawah dua persen karena sebagian belanja APBN udah dialokasikan kepada belanja-belanja terikat, seperti belanja pegawai dan barang serta belanja subsidi, sehingga diskresi pemerintah untuk menambah alokasi belanja infrastruktur sulit dilakukan karena ruang fiskal sangat sempit. Walaupun anggaran pemerintah untuk belanja modal terus meningkat secara nominal, tetapi secara rasio terhadap PDB masih tetap di bawah 2%.

Aksi Strategis Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk semua BBM yang bersubsidi. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM baru tersebut. Dengan kenaikan ini harga baru BBM jenis premium menjadi Rp 8.500 per liter yang sebelumnya Rp 6.500 per liter; sementara solar menjadi Rp 7.500 per liter yang sebelumnya Rp 5.500 per liter. Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut berlaku efektif sejak pukul 00.00 WIB tanggal 18 November 2014. Ini merupakan keputusan berani dari Presiden Joko Widodo yang belum lama dilantik. Keputusan berani ini tentu saja mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tetapi juga memunculkan sikap kontra.

Pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo kemudian disusul dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu. Peraturan Menteri ESDM ini memuat harga baru premium subsidi menjadi Rp 8.500 per liter; harga jual solar subsidi menjadi Rp 7.500 per liter dan minyak tanah/kerosin tidak mengalami perubahan, tetap Rp 2.500 per liter.

Sebenarnya pemerintah memiliki beberapa opsi kenaikan harga BBM bersubsidi kenaikan Rp. 1.000, Rp. 2.000 dan Rp. 3.000 per liter. Namun, pemerintah memutuskan untuk melakukan kenaikan harga sebesar Rp 2.000 per liter.

Dampak lebih lanjut dari penurunan subsidi BBM ini adalah adanya kenaikan inflasi. Namun, Bank Indonesia masih meyakini inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi masih bisa terkendali. Penurunan subsidi ini juga akan menurunkan impor minyak sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi defisit transaksi berjalan yang berasal dari menurunnya defisit neraca perdagangan migas. Menurut perhitungan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan kenaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan inflasi di Indonesia menjadi 7,3% sampai dengan akhir tahun 2014. Kenaikan inflasi sampai akhir tahun sekitar 2% dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter baik untuk premium dan solar.

Bank Indonesia memprediksi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi akan bisameningkatkan sektor produksi. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengurangan subsidi BBM berarti ada realokasi anggaran untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,4-5,8%, atau bahkan bisa tumbuh lebih tinggi.

Seperti telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo, alokasi anggaran dari kenaikan harga BBM bersubsidi diarahkan untuk sektor-sektor produktif, termasuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Untuk sektor pendidikan dan kesehatan akan

dialokasikan anggaran untuk memperkuat perlindungan sosial bagi golongan tidak mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

Menurut Bappenas (2014), dengan kenaikan harga BBM bersubsidi pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar Rp 136,2 triliun, tapi angka ini tentu saja bisa berubah tergantung harga minyak dunia. Perubahan anggaran dalam bentuk realokasi anggaran yang berasal dari penghematan subsidi BBM ini baru dapat dilihat setelah ditetapkannya asumsi makro APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2015.

Tabel 3: Rincian Infastruktur Prioritas

Infrastruktur Prioritas	Jenis Proyek
Perhubungan dan maritim	Jalan raya, jembatan, jalur kereta api, bus <i>rapid transit</i> , bandara, revitalisasi 24 pelabuhan (laut) utama, membangun terminal peti kemas dan penumpang, memperkuat armada patroli
Energi	Kilang minyak baru, pembangkit listrik, jaringan transmisi listrik, jaringan gas kota, peningkatan kapasitas garduinduk.
Pariwisata	Infrastruktur pendukung wisata alam dan budaya, infrastruktur teknologi komunikasi, aksesabilitas/konektivitas penerbangan langsung.
Kedaulatan pangan	Membangun tambahan 50 waduk baru, perbaikan sarana irigasi

Sumber: Bappenas (2014)

Sebagai gambaran empat sektor prioritas infrastruktur akan dikembangkan adalah perhubungan dan maritim, energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan. Detail mengenai rencana pembangunan infrastruktur prioritas tersebut diuraikan dalam tabel. Sesuai janji pemerintah realokasi tambahan anggaran dari penghematan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur lebih dari 50%.

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia
Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212
e-mail: thc@habibiecenter.or.id
www.habibiecenter.or.id